

BAB III

KONDISI POLITIK DAN AGAMA PADA MASA KI.KMS.H.M.ZEN

MUKTI (1338-1400 H/1919-1980 M)

A. Kondisi Politik Pada Masa Ki.Kms.H.M.Zen Mukti

Sebelum mengulik kondisi politik pada masa Ki.Kms.H.M.Zen Mukti, terlebih dahulu kita mengulas kembali relasi antara umat Islam dan politik masa Orde Baru.¹ Syamsuddin menyebutkan bahwa dalam relevansi tersebut telah terjadi fase naik turun, dimana fase pertama antara tahun 1386-1396 H/1966-1976 M merupakan fase umat Islam cenderung berada dalam kontrol pemerintah hingga mengalami marjinalisasi. Fase kedua antara tahun 1396-1406 H/1976-1986 M adalah fase penyesuaian umat Islam terhadap aturan pemerintah.²

Sependapat dengan Syamsuddin, R William Liddle berasumsi bahwa pada rentang waktu antara akhir 1379 H/1960 M hingga pertengahan tahun 1400 H/1980 M umat Islam menjadi kambing hitam pemerintah. Namun semenjak pertengahan tahun 1400 H/1980 M itu juga kepercayaan pemerintah kembali membaik terhadap umat Islam khususnya di kalangan Islam politik.³

¹ Orde Baru lahir atas dukungan dari kalangan pelajar, mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Kesatuan Aksi yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965 mengetengahkan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) dan Tuntutan Hatinurani Rakyat (TUNHANURA). Guna merespon anomie dalam masyarakat akhirnya KAPPI dan KAMI sering melakukan kegiatan demonstrasi sebagai aksi kepedulian terhadap buruknya rezim Orde Lama. Lebih lengkap baca, Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hal.100-101.

² M.D.Syamsuddin, *Islam Dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001, hal.63-73

³ Lebih jelasnya baca, R William Liddle, *Islam Politik Dan Modernisasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997, hal. 69-70

Sementara itu dalam kaca mata Abdul Azis Thaba, selama masa Orde Baru wujud relevansi kalangan Islam politik dan pemerintah terbagi dalam tiga pola. Pertama pola hubungan bersifat antitesis yang terjadi antara kurun tahun 1386-1402 H/1966-1982 M, dalam artian bahwa hubungan tersebut berlawanan dimana posisi pemerintah yang terlalu hegemonik menjadikan kalangan Islam berada di bawah. Pola ini merupakan klimaks daripada gagalnya rehabilitasi partai Masyumi dan pendirian partai Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Kedua pola hubungan bersifat resiprokal kritis (1402-1405 H/1982-1985 M), dimana konfrontasi yang terjadi lebih bersifat koseptual walaupun sifat antagonistik masih melekat. Hal ini karena kedua belah pihak mulai menyadari adanya keuntungan dari hubungan timbal balik tersebut. Ketiga pola hubungan akomodatif (1406-1414 H/1986-1994 M), pola ini merupakan implikasi daripada hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan kalangan Islam politik. Wujud dari pola ini seperti lahirnya ICMI, RUU Peradilan agama dan sebagainya.⁴

Dari beberapa asumsi di atas dapat dicerna jika rentang waktu antara 1386-1402 H/1966-1982 M merupakan masa terpuruknya umat Islam, oleh sebab itulah pada masa ini juga mulai terjadinya depolitisasi terhadap umat Islam. Pada masa ini juga lah pengaruh umat muslim mulai terpinggirkan dalam pentas politik nasional.

⁴Abdul Azis Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1997, hal.240. Baca juga Abdul Azis Thaba, dkk, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru(1966-1994)*, BPPS UGM Nomer 8 (2A) Mei 1995, Program Studi Ilmu Politik, Pasca Universitas Gadjah Mada.

Sebetulnya depolitisasi umat Islam sudah terjadi jauh sebelum masa Orde Baru, pada masa Orde Lama konfrontasi dimulai ketika presiden Soekarno mencanangkan ideologi Nasakom.⁵ Namun ideologi tersebut tidak diterima oleh partai Masyumi yang pada masa itu merupakan partai berbasis Islam terbesar. Atas dasar hal tersebut Masyumi mulai kehilangan eksistensinya, tidak hanya itu partai-partai yang dianggap radikal lain pun tak luput dari pantauan presiden Soekarno sehingga memiliki nasib yang sama.

Sementara itu pada masa orde baru upaya tersebut juga berlaku, pada masa orde baru telah terjadi pengkebirian terhadap partai yang ada di Indonesia tak terkecuali partai berbasis Islam. Pada masa Orde Baru presiden Soeharto berhasil memandulkan dan memobilisasi partai-partai dan peranannya dalam dunia politik di Indonesia. Ini terlihat dari caranya dalam memangkas parpol menjadi tiga partai besar, yakni PPP, Golkar dan PDI pada tahun 1390 H/1970-an.⁶

Tampilnya Orde Baru di panggung politik Indonesia dengan berhasil menggeser posisi demokrasi terpimpin masa Soekarno, menjadikan ideologi bukan prioritas utama. Masa Orde Baru pemerintah lebih menekankan pada aspek pembangunan dibandingkan masalah ideologi, hal ini karena

⁵ Ideologi Nasakom menghendaki percampuran antara paham nasionalisme, agama Islam dan marxisme (komunis) yang diwacanakan sebagai ideologi negara pada masa demokrasi terpimpin, namun upaya presiden Soekarno tersebut memunculkan polemik dikalangan politik Islam, militer dan pihak lainnya karena memasukkan paham komunis yang dianggap berlawanan dengan ideologi agama sehingga terjadilah pro kontra antara presiden Soekarno dan partai-partai seperti Masyumi dan PSI. Baca, M.C.Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Terj.Serambi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008, hal.556

⁶ Muh. Syamsudin dan Muh.Fatkhan, "Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru", Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Dakwah*, Vol. XI No. 2 Juli-Desember, 2010. hal, 145

ditakutkan kembalinya oposisi yang menentang ideologi Pancasila dan UUD 1945 khususnya dari kalangan ekstrim kanan. Era presiden Soeharto intervensi pemerintah sangatlah kuat, ini terlihat dimana masyarakat biasa dimatikan suara dan peranannya saat itu.⁷

Tak hanya itu saja bahkan gerak gerak masyarakat saat itu sangat terpantau dengan baik oleh pemerintah termasuklah partai-partai Islam dan ormas serta organisasi keagamaan. Dalam melaksanakan kebijakannya, pemerintah Orde Baru mengharuskan setiap organisasi, partai politik dan ormas lainnya untuk berlandaskan ideologi Pancasila. Akibatnya dengan adanya kebijakan tersebut telah mematikan berbagai macam organisasi, partai politik dan sebagainya. Jika masa Orde Lama dikenal dengan wacana gerakan politik yang begitu kentara, sementara masa Orde Baru cenderung mengacu pada aspek pembangunan, deideologisasi, deparpolisasi dan sebagainya.⁸

Pemerintah berdalih bahwa dengan adanya penerapan ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal, hal ini akan mendorong partai-partai politik lebih berfokus pada program bukan terhadap ideologi masing-masing kelompok. Sehubungan dengan ini, ideologi diyakini menjadi sumber konflik diantara partai politik. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3 Tahun 1985 pada tanggal 19 Februari 1390 H/ 1985 M tentang ditetapkannya Pancasila sebagai asal tunggal bagi partai Golkar dan partai politik lainnya. Keadaan ini juga berlanjut hingga ke organisasi-organisasi

⁷ *Ibid*, hal.144

⁸ Fachry Ali Dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam (Rekonstruksi Pemikiran Orde Baru)*, Bandung: Mizan, 1984, hal.95

massa dan keagamaan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1985 pada tanggal 17 Juni 1390 H/1985 M.⁹

Dengan disetujuinya Undang-Undang oleh DPR secara resmi Pancasila ditetapkan sebagai ideologi tunggal, implikasi daripada kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Islam khususnya bagi kalangan Islam politik. Hal ini karena dalam tubuh kelompok-kelompok politik Islam sendiri sudah lebih dulu tumbuh dan mengakar ideologi Islam yang dipahami sebagai ciri khas dari masing-masing partai politik.

Berbedaan yang mencolok antara masa Orde Lama dengan Orde Baru sangat terlihat jelas dengan sistem yang diterapkan oleh keduanya. Pada sistem Orde Lama masa demokrasi Terpimpin para elit penguasa terdiri atas kalangan birokrasi, kelompok nasionalis, komunis dan tentara, sedangkan pada sistem Orde Baru masa demokrasi Pancasila elit penguasa terdiri dari militer, birokrat, teknokrat dan pemilik modal nasional.¹⁰

Meminjam apa yang disebut Taufiq Nograho dalam bukunya, sebenarnya kebijakan masa orde baru dalam merealisasikan program kerja tersebut telah memamatkan ideologi komunal. Tak terkecuali ideologi Islam yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.¹¹ Kuntowidjoyo melihat pemerintahan Orde Baru sangat sensitif terhadap gerakan berbasis

⁹ Dedek Sulaiman, "Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Pemberlakuan Asas Tunggal)", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal.35

¹⁰ Kamsi, "Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)", *Jurnal Millah*, Vol. Xiii, No. 1, Agustus, 2013, hal.129

¹¹ Taufiq Nograho, *Pasang Surut Hubungan Islam Dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: Padma, 2003, hal.89

politik Islam, sehingga pada masa itu umat Islam termarginalkan. Tidak hanya itu saja akibat adanya tekanan-tekanan oleh pemerintah, wajah politik Islam sudah mengalami krisis kepercayaan.¹²

Oleh sebab itulah upaya pemerintah Orde Baru ini sangat jelas sekali terlihat daripada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Watson dikutip oleh Dede Sulaiman memandang bahwa ada tiga kebijakan yang mengindikasikan menyingkirkan umat Islam dalam pentas politik diantaranya seperti, adanya pemusnahan pengaruh para mantan anggota partai Masyumi dalam dunia politik dan pemerintahan, adanya fusi partai Islam menjadi satu wadah, dan adanya perkembangan lembaga-lembaga agama melalui departemen agama.¹³

Sebenarnya pemerintah Orde Baru saat itu memiliki alasan kenapa mereka sangat kekeh ingin mematikan gerak kalangan Islam politik, gesekan yang pernah terjadi pada pendahulunya Orde Lama dengan kalangan Islam politik menjadi landasan kenapa pada masa Orde Baru tidak begitu respon terhadap partai Islam, dengan dalih bahwa kalangan Islam (ektrim kanan) juga berbahaya bagi kelangsungan parlemen dan ideologi Pancasila yang dianggap akan tergeser oleh ideologi Islam.¹⁴

¹² Baca lebih lanjut dalam M.Rusli Karim, *Dinamika Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Hanindita, 1985, hal.191-192

¹³ Dede Sulaiman, *"Deideologi Politik Islam (Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Pemberlakuan Asas Tunggal..."*, 2008 hal. 30

¹⁴ Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal.246-249

Pada gilirannya alasan tersebutlah menjadikan Islam politik tidak mendapat tempat dihati Soeharto karena dianggap menjadi bagian dari oposisi. Terlebih lagi pada masa Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Sehingga masalah yang berlawanan dengan asas pembangunan dan ideologi Pancasila harus dikesampingkan.

Disisi lain dengan adanya depolitisasi ternyata justru memunculkan wajah baru Islam Indonesia pada dekade 1400 H/1980 M. Arah baru Islam tersebut dikenal dengan istilah Islam Kultural atau Islam yang menjurus pada kebudayaan. Sehingga *mindset* umat Islam berubah dari hanya Islam politik kini menjurus kepada Islam Kultural.¹⁵ Kuntowijoyo menilai jika wajah baru Islam Indonesia tersebut terwujud dalam tiga format baru

¹⁵ Fenomena Islam kultural ini dipelopori oleh Nurcholis Majid dan Abdurahman Wahid. Pemikiran Nurcholis Majid ini dipandang sebagai pemikiran yang cenderung liberal karena menginginkan wajah Islam formalis yang ketika itu tidak dikehendaki rezim orde baru menjadi Islam yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern sehingga apresiasi yang diberikan Islam adalah apresiasi ilmiah bukan ideologis formalis. Lebih jauhnya, negara Islam yang selama ini dicita-citakan Islam formalis, merupakan sebuah gejala apologetis umat Islam yang terbelakang terhadap kemajuan dunia Barat. Menurutnya dalam konsep negara itu harus membedakan mana ranah negara dan mana ranah untuk agama, sehingga agama Islam diposisikan sebagai sesuatu yang lebih abstrak yang fungsinya mengarahkan umat Islam dalam menentukan sikap dalam kehidupan spiritual, jadi Islam tidak dipahami sebagai sesuatu yang melahirkan kehidupan bernegara. Baca dalam, Jungjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru", *Jurnal Isti'na*, No.16 Tahun XIV Juni 2015, hal.204. Sementara itu Abdurahman Wahid mengeluarkan gagasan tentang pentingnya pribumisasi Islam, hal ini sebagai jawaban daripada masalah kehidupan umat Islam. Dalam gagasan yang diwacanakan Abdurahman Wahid menekankan pada pentingnya menggabungkan antara budaya lokal dengan aturan Islam (syari'ah). Inilah kenapa polemik gagasan ini berseberangan dengan Islam inklusif dan puritan, namun menurutnya dalam pribumisasi Islam ini mencari cara agar dapat memperkuat kembali akar budaya tanpa mereduksi kebenaran agama. Lihat dalam Santoso Listiono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2004, hal.126.

gerakan yakni: gerakan intelektual, gerakan etik dan gerakan estetik.¹⁶

Gerakan-gerakan inilah yang nantinya akan membentuk pola Islam Kultural.

Ada beberapa macam ciri khas daripada pola Islam Kultural diantaranya yakni: pertama, semakin menjamurnya kaum pemimpin intelektual Islam dan pudarnya para pemimpin politik Islam terutama dikalangan terpelajar. Kedua, semakin lemahnya bahasan mengenai masalah yang bersifat furu'iyah dan tampak semakin menonjolnya isu-isu berkenaan dengan sosial, ekonomi, intelektual dan estetika dalam Islam. Ketiga, semakin melemahnya sikap penganut mazhab-mazhab dan semakin maraknya sikap-sikap non mazhab disebagian besar kalangan umat Islam, terutama dikalangan generasi muda Islam. Keempat, munculnya wajah Islam baru yang lebih inklusif sehingga konsep umat Islam yang tadinya eksklusif khususnya dikalangan partai politik Islam dan organisasi massa mengalami pelonggaran konsep.¹⁷

Pada dasarnya munculnya fenomena Islam Kultural ini memberikan warna baru bagi umat Islam Indonesia khususnya dikalangan Islam politik. Umat Islam yang dianggap kaku telah menjelma menjadi kaum reformis yang menghayati agama Islam bukan lagi satu arah (politik) akan tetapi lebih ke arah yang luas seperti dakwah, pendidikan, budaya, ekonomi dan sebagainya.

¹⁶Muh. Syamsuddin & Muh. Fatkhan, "Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru", Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Dakwah*, Vol. Xi No. 2, Juli-Desember 2010, hal. 147

¹⁷Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 94

Jika mencermati transformasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya ulama-ulama yang terbiasa bergelut dalam dunia politik mulai beradaptasi dengan pemerintah Orde Baru dengan cara yang berbeda dalam membangun negara. Dengan kata lain, Islam kultural merupakan titik jenuh daripada belenggu rezim Orde Baru saat itu. Apa lagi fokus pemerintah Orde Baru lebih cenderung mengarah kepada pembangunan ekonomi dan memaksakan ideologi Pancasila terhadap seluruh partai politik dan berbagai ormas sehingga terjadi bias antara pemerintah dengan kalangan Islam politik.

Ciri yang mendasar dari perubahan tersebut yakni orientasi umat Islam bukan lagi menjurus kepada kekuasaan namun lebih mengarah ke aspek dakwah dan pencerahan terhadap umat Muslim sendiri. Hal ini nampak jelas ketika kaum intelektual Muslim begitu kentara mendominasi gerakan Islam ketimbang masa awal Orde Baru yang umumnya masih dipegang oleh kalangan ulama dan politikus Muslim. Ternyata konsep Islam kultural ini telah menjadi alternatif baru bagi umat Islam dalam membangun bangsa, berkat dakwah dan pencerahan tersebut akhirnya membawa umat Islam ke posisi sentral.

Kondisi inilah yang memicu Ki.Kms.H.M.Zen Mukti akhirnya memutuskan beralih menjadi pendakwah, adanya faktor sentimen pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam politik menjadikan umat Islam terbelenggu dalam jurang keputusan, namun disisi lain kondisi ini justru malah mendatangkan sisi positif bagi umat Islam dengan lahirnya

Islam kultural. Dengan bergantinya kulit umat Islam yang semula terkenal dengan garis kerasnya berubah kearah yang cenderung halus maka secara otomatis hal ini turut berimplikasi terhadap diterimanya kembali umat Islam oleh pemerintah Orde Baru.

Tidak hanya itu saja, adanya faktor kepentingan pemerintah terhadap menarik simpati rakyat menjadi salah satu sebab diterimanya kembali umat Islam. Inilah kenapa Ki.Kms.H.M.Zen Mukti mengubah arah pola fikirnya pada masa Orde Baru dengan memanfaatkan dakwah sebagai adaptasi daripada kebijakan Orde Baru. Sehingga kegiatannya dalam membangun negara masih bisa dilakukan walaupun dalam ranah yang berbeda pula.

B. Kondisi Agama Islam Pada Masa Ki.Kms.H.M.Zen Mukti

Ketika dakwah Ki.Kms.H.M.Zen Mukti tengah meroket, agama Islam saat itu tengah mengalami degradasi yang cukup serius. Adanya pemerkosaan yang dilakukan oleh pemerintah masa orde lama hingga masa orde baru terhadap umat Islam menjadikan tersumbatnya laju gerak umat Islam. Kecemasan yang dialami pemerintah saat itu dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan akan masuknya umat Islam dalam tatanan pemerintahan yang di nilai dapat menumbangkan kekuasaan pemerintahan yang ada. Tendensi pemerintah yang tidak begitu memberikan respon positif bagi umat Islam ditunjukkan lewat jalan kebijakan yang diterapkan masa itu. Dimana pada masa orde lama hingga orde baru telah terjadi upaya pengkebirian terhadap umat Islam khususnya dalam masalah politik dan

pemerintahan. Tidak hanya itu saja upaya tersebut juga turut berimplikasi pada kehidupan religius umat Islam.

Seperti kasus tahun 1980an, adanya pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah. Sebenarnya secara umum jilbab atau kerudung baru muncul di ranah publik mulai sekitar tahun 1980'an, karena sebelumnya jilbab masih menjadi bagian dari identitas santri di pesantren. Namun setelah *boomingnya* berita mengenai revolusi Iran pada masa imam Khomaeni rupanya turut juga berimplikasi pada pola pikir masyarakat Indonesia yang selama ini terbelenggu oleh perilaku Baratisasi, budaya Barat yang cenderung hedonis tersebut perlahan mulai dikikis sedikit demi sedikit oleh masyarakat muslim khususnya.

Akan tetapi maraknya penggunaan jilbab di sekolah-sekolah ternyata tidak mendapatkan respon baik dari pemerintah, pada saat itu pemerintah beralih bahwasanya jilbab dianggap tidak memenuhi kriteria standar seragam sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada peraturan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen P dan K) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82, mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Keputusan pemerintah masa Orde Baru yang melarang pemakaian jilbab tersebut telah terjadi dari tahun 1387-1411 H/1982-1991 M.¹⁸

¹⁸ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri se-Jabodetabek, 1982-1991*, (Jakarta: I'tishom, 2002), hal. 17-22

Kedua kasus Tanjung Priok 1984, kasus ini bermula adanya kebijakan rezim Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi berbagai organisasi massa (ormas) dan organisasi sosial politik. Kebijakan ini memunculkan reaksi keras dari berbagai elemen termasuklah komunitas muslim Priok. Bentuk-bentuk protes komunitas muslim Priok terhadap konsep asas tunggal Pancasila tersebar melalui pamflet dan ceramah dalam pengajian-pengajian, baik yang berskala kecil maupun besar.

Pada 12 Dzul Hijjah 1504 H/ 8 September 1984 M terjadi isu bahwa Sersan Satu Hermanu, aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) masuk ke Mushola As-sa'adah untuk mencopot sisa-sisa pamflet yang berada di dinding mushola tersebut. Rumor ini tersebar ke penjuru wilayah Tanjung Priok dan Jakarta, sehingga memicu amarah masyarakat muslim Priok. Akibatnya terjadi insiden pembakaran motor Sertu Hermanu oleh masyarakat sekitar Koja yang kemudian berujung pada penangkapan empat orang warga Koja dan jamaah Mushola tersebut oleh pihak aparat keamanan. Puncak dari konflik ini dengan munculnya massa yang memprotes pembebasan empat orang yang ditahan tersebut. Awalnya massa ini merupakan kelompok pengajian pimpinan Amir Biki, namun pengajian ini berubah menjadi lautan massa yang memprotes keras tindakan aparat pemerintah tersebut. Akibat peristiwa ini merenggut banyak korban, sekitar 50 orang mengalami luka-luka dan 300 orang meninggal dunia.¹⁹

¹⁹ Wahyudi Akmaliah, "Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus 'Penyelesaian Konflik' Peristiwa Tanjung Priok (1984) Dan Talang Sari (1989) Pasca Rezim Orde Baru", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 No. 1 Tahun 2014, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), hal. 175-176

Ketiga kasus Talang Sari atau yang biasa dikenal dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), kasus ini terjadi pada tanggal 1 Rajab 1409 H/7 Februari 1989 namun kasus ini lebih bersifat lokal. Dalam kronik Kontras dikutip Wahyudi Akmaliah disebutkan bahwa pada awalnya peristiwa ini bermula saat adanya migrasi beberapa orang dari wilayah Solo, Jakarta, dan Bandung ke Dusun Rajabasa Lama, Lampung Tengah antara Desember 1408 H/1988 M – 1409 H/1989 M. Disinyalir ada beragam motif orang-orang tersebut bermigrasi ke Lampung, diantaranya ialah untuk menghindari operasi penangkapan yang dilakukan oleh Pangdam Diponegoro Mayjen Harsudiono Hartas terkait dengan aktivis gerakan usroh Abdullah Sungkar di Solo. Kedua untuk membangun Islamic village dan juga bergabung dengan kelompok pengajian Warsidi guna mempelajari agama Islam lebih mendalam.²⁰

Dalam sejarahnya Umbul Cihideung merupakan bagian dari wilayah desa Labuhan Ratu, namun sejak 1 Januari menjadi bagian desa Rajabasa Lama, kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah. Umbul Cihideung digabungkan dengan Umbul Kebon Duren lalu berubah menjadi Dusun Talang Sari III. Awal mulanya konflik Talang Sari ini dipicu karena ketidak sukaan pemerintah terhadap keberadaan pendatang baru di Talang Sari. Ketegangan ini semakin panas setelah Warsidi menolak permintaan Camat Way Jepara untuk menghadap ke kantor. Akan tetapi sebaliknya Warsidi mengajak Camat Way Jepara untuk berkunjung ke

²⁰*Ibid.*,hal. 176

pengajian tersebut. Setelah itu mulailah timbul konfrontasi antara kelompok pengajian Warsidi dengan pihak pemerintah daerah.²¹

Akibat dari konfrontasi tersebut dari hasil penyelidikan pro justisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2008, diketahui telah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut pembunuhan terhadap 130 orang, pengusiran 77 orang penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan 53 orang, penyiksaan 46 orang, dan penganiayaan atau persekusi sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang.²²

Dari ketiga kasus tersebut dapat ditelaah jika sebetulnya pada masa awal orde baru tidak begitu ramah terhadap umat Islam, hal ini sangatlah wajar jika mencermati kondisi perpolitikan Indonesia yang sudah pernah penulis bahas dalam sub judul sebelumnya. Iklim politik Indonesia masa orde lama cenderung panas, dimana konflik antara pemerintah dengan kalangan Islam politik telah mendesak umat Islam menuju kemunduran dan kesengsaraan. Akibat dari masalah tersebut, bahkan pada masa awal orde baru pun umat Islam tetap masih mengalami pengucilan oleh pemerintah saat itu.

Namun seperti yang sudah dijelaskan pada sub judul sebelumnya, walaupun termajinalisasinya umat Islam masa orde baru, namun nampaknya kondisi tersebut ternyata justru memberikan ruang baru bagi umat Islam khususnya dalam masalah spritual dan sosial. Dengan kata lain, semakin

²¹ Abdul Syukur, "Gerakan Ratu Adil Dalam Peristiwa Lampung 1989", *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol.6 No.2 Juli-Desember 2019, hal.6

²² Wahyudi Akmaliah, *Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus 'Penyelesaian Konflik' Peristiwa Tanjung Priok (1984) Dan Talang Sari (1989) Pasca Rezim Orde Baru...*, hal. 179

maraknya kegiatan keagamaan dari segi dakwah, pendalaman ilmu agama, dan ibadah lainnya membuat umat Islam menjelma menjadi sesuatu yang berwujud baru yaitu Islam Kultural.

Kondisi inilah justru menjadi pemantik umat Islam untuk bangkit dari cengkeraman rezim Orde Baru. Inilah yang disebut Kuntowijoyo sebagai titik nadi umat Islam yang dipelopori oleh kaum tradisonalis dan modernis.²³ Titik balik dari perubahan ini berupa bentuk akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam pada dekade 1980-an, lewat pelbagai pemenuhan aspirasi umat Islam relasi antara umat Islam dan pemerintah secara perlahan mulai membaik. Pemenuhan aspirasi tersebut bukan tidak beralasan, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim sehingga dengan adanya akomodasi ini diharapkan dapat mendapat dukungan dari rakyat secara penuh. Inilah yang disebut oleh Afan Gaffar sebagai usaha pemerintah untuk memobilisasi simpatisan.²⁴

Dengan kata lain, upaya tersebut diharapkan mampu menarik massa sebanyak-banyaknya. Selain itu, alasan lain yang menjadi pemicu pemerintah melakukan akomodasi yakni seperti adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia bukan lagi sebagai kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik nasional. Kedua, adanya kemudahan pemerintah dalam mengatur politik Islam di Indonesia dengan cara halus.²⁵

²³ Lili Romli, "Partai Islam Dan Pemilih Islam Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.1 No.1 2004, Hal.35

²⁴ Baca Kamsi, *Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekan Sampai Dengan Era Orde Baru)*, Jurnal Millah, Vol. Xiii, No. 1, Agustus, 2013, hal.140

²⁵ *Ibid*, hal. 141

Sementara itu, Bahtiar Effendi memandang perubahan sikap presiden Soeharto dilatar belakangi oleh dua sebab yaitu, pertama selama 25 tahun terakhir umat Islam mengalami proses mobilisasi sosial-ekonomi dan meluasnya akses ke pendidikan tinggi modern. Mereka tertransformasikan ke dalam entitas level menengah, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Kedua, adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam. Umat Islam telah mengalami transformasi intelektual dan aktivisme yang semula bersifat legalistik-formalistik menjadi lebih substansialistik.²⁶

Sebenarnya kemunculan akomodasi pemerintah orde baru terhadap umat Islam ini sangat jelas sekali terlihat dengan beberapa indikator, Affan Gafar²⁷ dalam jurnalnya secara eksplisit menjabarkan mengenai tanda-tanda akomodasi tersebut antara lain:

- a. Ketika Fuad Hasan menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segala hal ihwal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat muslim yang dilarang oleh pemerintah orde baru, pada masa itu jabatan Menteri masih dipegang oleh Daud Yusuf. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Daud Yusuf secara perlahan mulai dihapuskan oleh Fuad Hasan seperti diperbolehkan penggunaan hijab di sekolah-sekolah.
- b. Adanya ketegasan pemerintah orde baru terhadap media cetak yang diduga memuat berita menghina agama Islam di Indonesia dengan jalan membasmi

²⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktis Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hal. 393-394

²⁷ Afan Gaffar, "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru", *Jurnal UNISIA*, No. 1 Tahun XIII Triwulan VI, 1993, hal.73

koran atau majalah yang memicu ketegangan umat Islam seperti yang terjadi pada rubrik Mingguan Monitor di majalah Tempo. Sebenarnya rubrik Mingguan Monitor ini dibuat oleh kaum Katolik yang tidak begitu ramah terhadap kalangan muslim.

- c. Terbentuknya Undang-Undang Peradilan Agama, namun pada awalnya usaha pembentukan UU Peradilan Agama tersebut sangat ditentang oleh kalangan non-Muslim dan fraksi Golkar yang sudah lebih dulu mendukung kalangan non-Muslim. Hal ini karena ditakutkan kembalinya Piagam Jakarta, lewat media massa seperti Suara Pembaharuan dan Kompas mereka berhasil mendapatkan celah untuk menentang kebijakan tersebut. Akan tetapi upaya tersebut tidak berjalan dengan mulus hingga Presiden Soeharto berhasil meyakinkan kelompok-kelompok tersebut.
- d. Lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie.²⁸
- e. Dibentuknya Yayasan Amal Bakti Pancasila yang menaungi berbagai aspirasi umat Islam seperti pembangunan saran peribadatan, pengiriman dai-dai ke daerah-daerah dan sebagainya.
- f. Banyaknya kaum intelektual muslim yang masuk menjadi anggota MPR mewakili golongannya masing-masing.

²⁸ Dengan hadirnya ICMI berdampak pada relasi antara pemerintah dan umat Islam. kehadiran ICMI ini pada awalnya mengalami pro dan kontra, ini karena adanya pihak yang menghendaki ICMI berdiri secara independen sementara dilain pihak menghendaki ikut dalam birokrasi. Akibatnya munculah ketegangan saat berdirinya ICMI. Menurut Hefner pada saat proses pembentukan ICMI keterlibatan pemerintah cukup kuat , ini terlihat dari banyaknya departemen pemerintah yang dikumpulkan. Disamping para pejabat birokrat, kaum cendekiawan Muslim (independen) pun ikut terlibat dalam hal ini. Baca Nurul Fajdri, Dkk, (Ed)., "Kultur Kelas Menengah Dan Kelahiran ICMI", *Jurnal Studia Islamika*, Vol.1 No.1 April-Juni 1994, Hal.222

Disamping beberapa ciri-ciri akomodasi tersebut, disahkannya UU Perbankan tentang keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan sistem ekonomi syariah dan diperbolehkannya berdirinya bank-bank berdasarkan sistem ekonomi syariah, berdirilah bank-bank perkreditan syariah (BPR Syariah) dan Bank Muamalat.²⁹ Tidak hanya itu saja, ada juga operasi pemberantasan pornografi, kriminalitas dan sebagainya.

Dengan begitu banyaknya akomodasi yang telah dilakukan oleh pemerintah orde baru terhadap umat Islam, sikap masyarakat Muslim sendiri sangat antusias menanggapi kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan tersebut. Dalam hal ini, sikap akomodasi ternyata juga diperlihatkan umat Islam kepada pemerintah orde baru antara lain³⁰ seperti:

- a. Adanya dukungan dari beberapa tokoh Islam dan ulama dalam majunya presiden Soeharto pada pilpres periode 1413-1419 H/1993-1998 M.
- b. Pada tahun 1412 H/1992 M, adanya maksud memberi dukungan kepada presiden Soeharto dengan jalan menjalin silaturahmi antara Muhammadiyah dengan presiden Soeharto untuk kembali naik pada periode 1413-118 H/1993-1998 M memberikan contoh kepada organisasi lainnya untuk berbuat hal yang sama.
- c. Diadakannya doa politik untuk pemilihan kembali Presiden Soeharto, ini merupakan puncak dari dukungan umat Islam terhadap kembali majunya presiden Soeharto di pentas politik.

²⁹ Kamsi, *Citra Gerakan Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia (Studi Era Pra Kemerdekaan Sampai Dengan Era Orde Baru)*..., hal.144

³⁰ *Ibid*, hal.144-145

Dengan kata lain, konsep akomodasi ini telah membawa korelasi bagi umat Islam dan juga bagi pemerintah sendiri. Secara umum, kondisi ini telah menjadi ajang bagi kepentingan masing-masing pihak untuk sama-sama mencari keuntungan dari relasi tersebut.

